



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah benturan kepentingan dan peningkatan efektifitas pengawasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu dibentuk Matriks Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Matriks Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Matriks Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN
 BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

MATRIKS IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendek atan Individu	Strategi Penanganan/Pendeka tan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komisio ner	Situasi yang menyebabkan menerima gratifikasi atas suatu keputusan/jab atan terhadap pihak internal dan eksternal	Keputusan/ke bijakan yang berpihak akibat: a. Pengaruh/ hubungan dekat/keter gantungan b. Pemberian gratifikasi	a. Sedang b. Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma- Cuma, dan fasilitas lainnya	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan ke Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan	1. Internalisasi/ sosial isasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatam media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan	Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi/golongan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Situasai yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan	Penggunaan rahasia Negara untuk kepentingan pribadi/golongan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 5. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Situasi dimana memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen badan adhock tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya	Pengangkatan badan adhock berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomen dari pejabat pemerintah/pengaruh dari partai politik	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan dan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya			
		Situasai dimana berafiliasi pada pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan	Pengambilan keputusan dan/atau kebijakan berafiliasi pada pemangku kepentingan	Tinggi	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendek atan Individu	Strategi Penanganan/Pendeka tan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada</p> <p>3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya</p>			

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Sekretaris	Situasi yang menyebabkan menerima gratifikasi atas suatu keputusan/jabatan terhadap pihak internal dan eksternal	Keputusan/kebijakan yang berpihak akibat: a. Pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan b. Pemberian gratifikasi	a. Sedang b. Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan Pelaporan penolakan dan penerimaan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	1. Internalisasi/sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatam media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi
		Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan	Penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi/golongan	Tinggi	1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima barang	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Situasai yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan	Penggunaan rahasia Negara untuk kepentingan pribadi/golongan	Tinggi	1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Situasi dimana memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai/badan adhoc tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya	1. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu	Sedang	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan pola rekrutmen/pengangkatan/promosi/mutasi	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen badan adhock</p> <p>3. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional</p>		<p>2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada</p> <p>3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya</p>	<p>4. Pelaporan penolakan dan penerimaan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan</p>		

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Situasai dimana berafiliasi pada pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan	Pengambilan keputusan dan/atau kebijakan berafiliasi pada pemangku kepentingan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya			
		Situasai dimana berafiliasi pada kepentingan penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang beralku	Tinggi	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam penunjukan penyedia barang/jasa	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan dan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas 2. Bimtek pengadaan barang/jasa 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada</p> <p>3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya</p>	<p>3. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>		

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Situasi dimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan menguntungkan pribadi atau golongan atau pihak tertentu baik internal maupun eksternal	Prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak transparan dan akuntabel	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan penyedia barang/jasa tidak sesuai ketentuan 2. Penentuan peserta Bimtek tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 3. Mendapatkan fasilitas/hadiah/bingkisan 	Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. Implementasi UPG 3. Penyusunan peta risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/ sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatan media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi
		Penggunaan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aset jabatan/ins tansi untuk kepentingan pribadi dan keluarga 2. Penggunaan aset jabatan/ins tansi di luar kedinasan 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. SOP Penatausahaan aset 3. SK Penetapan pengguna asset BMN 4. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/goiongan atau pemangku kepentingan	Tinggi	1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	Prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak transparan dan akuntabel	Sedang	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Rekrutmen pegawai dan badan adhock	1. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/mutasi/promosi pegawai	Sedang	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan pola rekrutmen/pengangkatan/promosi/mutasi 4. Implementasi UPG	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen badan adhock</p> <p>3. Melakukan pungli dalam proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/mutasi/promosi pegawai</p>		<p>2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada</p>			
		Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan	Pemilihan rekanan/penyedia jasa berdasarkan putusan yang tidak profesional	Rendah	<p>1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya</p>	<p>1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan</p> <p>2. Implementasi Whistle Blowing System</p> <p>3. Menetapkan SOP distribusi logistik</p>		<p>1. Komitmen dan Keteladanan</p> <p>2. Perhatian khusus atas hal tertentu</p> <p>3. Menghindari situasi benturan kepentingan</p> <p>4. Pemantauan dan evaluasi</p>

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendek atan Individu	Strategi Penanganan/Pendeka tan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
4.	Kasubb ag Teknis Penyele nggaran Pemilu dan Hukum	Gratifikasi	1. Penun jukan penyedia barang/jasa tidak sesuai ketentuan 2. Penent uan peserta Bimtek tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 3. Mendapatka n fasilitas/ha diah/bingki san	Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	1. Penandatanganan pakta integritas 2. Implementasi UPG 3. Penyusunan peta risiko	1. Internalisasi/ sosial isasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatam media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasi Monev Kode Etik dan Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Penggunaan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aset jabatan/ins tansi untuk kepentingan pribadi dan keluarga 2. Penggunaan aset jabatan/ins tansi di luar kedinasan 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. SOP Penatausahaan aset 3. SK Penetapan pengguna asset BMN 4. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan atau pemangku kepentingan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rekrutmen pegawai dan badan adhock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/mutasi/promosi pegawai 2. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen badan adhock 3. Melakukan pungli dalam proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/mutasi/promosi pegawai 	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan pola rekrutmen/pengangkatan/promosi/mutasi 4. Implementasi UPG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penetapan Hasil Pemilu dan Pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perubahan hasil pemilu/pemilihan 2. Membocorkan hasil pemilu/pemilihan sebelum ditetapkan 3. Melakukan pengli dalam proses penetapan hasil pemilu/pemilihan 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan SOP penetapan hasil pemilu/pemilihan 4. Implementasi UPG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perumusan dan Penyusunan Surat Keputusan	Perumusan dan penyusunan surat keputusan berafiliasi pada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan SOP perumusan dan penetapan surat keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penanganan sengketa Pemilu/Pemilihan	Penanganan sengketa Pemilu/Pemilihan berafiliasi pada pemangku kepentingan pemilu/pemilihan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan SOP penanganan sengketa pemilu/pemilihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan penyedia barang/jasa tidak sesuai ketentuan 2. Penentuan peserta Bimtek tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 3. Mendapatkan fasilitas/hadiah/bingkisan 	Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. Implementasi UPG 3. Penyusunan peta risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatan media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi
		Penggunaan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aset jabatan/insansi untuk kepentingan pribadi dan keluarga 2. Penggunaan aset jabatan/insansi di luar kedinasan 	Tinggi	1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. SOP Penatausahaan aset 3. SK Penetapan pengguna aset BMN 4. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan atau pemangku kepentingan	Tinggi	1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Rekrutmen pegawai dan badan adhock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/mutasi/promosi pegawai 2. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen badan adhock 	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan pola rekrutmen/pengangkatan/promosi/mutasi 4. Implementasi UPG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Melakukan pungli dalam proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/mutasi/promosi pegawai		2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
		Perencanaan anggaran dan kinerja	Penyusunan perencanaan anggaran dan kinerja tidak berdasarkan asas kemanfaatan program dan kegiatan instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juknis	Sedang	Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Menetapkan SOP perencanaan anggaran dan kinerja	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyusunan, Penetapan, dan Pemutakhiran Data Pemilih	Penyusunan, Penetapan, dan Pemutakhiran Data Pemilih tidak akurat akibat sistem validasi data pemilih yang tidak memenuhi kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juknis	Tinggi	Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Menetapkan SOP perencanaan anggaran dan kinerja 3. Memedomani peraturan perundang-undangan dan juknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi
		Penyebarluasan Informasi	Penyebarluasan informasi tidak terverifikasi sebagai informasi public yang dibolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak update	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Menetapkan SOP penyebaran informasi 3. Menetapkan pengelola informasi 4. Implementasi pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
6	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan penyedia barang/jasa tidak sesuai ketentuan 2. Penentuan peserta Bimtek tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 3. Mendapatkan fasilitas/hadiah/bingkisan 	Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. Implementasi UPG 3. Penyusunan peta risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/ sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatam media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penggunaan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi dan keluarga 2. Penggunaan aset jabatan/instansi di luar kedinasan 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. SOP Penatausahaan aset 3. SK Penetapan pengguna aset BMN 4. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima barang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan atau pemangku kepentingan	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rekrutmen pegawai dan badan adhock	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/promosi pegawai 2. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen badan adhock 3. Melakukan pungli dalam proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/promosi pegawai 	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi tindakannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System 3. Menetapkan pola rekrutmen/pengangkatan/promosi/mutasi 4. Implementasi UPG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Implementasi pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segmen sosialisasi tidak sesuai ketentuan 2. Wilayah sosialisasi tidak berdasarkan peta tingkat partisipasi pemilih rendah 	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan pertemanan atau kekerabatan yang dapat mempengaruhi tindakannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Menetapkan pola dan SOP sosialisasi dan pendidikan pemilih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Membangun Kerjasama Antar Instansi	Keputusan/kebijakan akibat Pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan pertemanan atau kekerabatan yang dapat mempengaruhi tindakannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Menetapkan pola kerjasama antar instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan/kebijakan akibat Pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan Memnfaatkan staf humas dan fasilitas kehumasan (foto, lay-out, video) di luar kedinasan/kepentingan pribadi dan motif ekonomi. Komersial dokumentasi video/foto untuk kepentingan pribadi dan motif ekonomi 	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan pertemanan atau kekerabatan yang dapat mempengaruhi tindakannya Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan Menetapkan pola kerjasama antar instansi Implementasi standar pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen dan Keteladanan Perhatian khusus atas hal tertentu Menghindari situasi benturan kepentingan Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelayanan administrasi kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi proses pelayanan administrasi kepegawaian 2. Melakukan pungli dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian 3. Pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan hubungan dekat/balasan jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat 	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Menetapkan SOP pelayanan administrasi kepegawaian 3. Implementasi UPG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen dan Keteladanan Perhatian khusus atas hal tertentu Menghindari situasi benturan kepentingan Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya			
7	Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan penyedia barang/jasa tidak sesuai ketentuan 2. Penentuan peserta Bimtek tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 3. Mendapatkan fasilitas/hadiah/bingkisan 	Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. Implementasi UPG 3. Penyusunan peta risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatam media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penunjukan Penyedia berafiliasi pada kepentingan penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam penunjukan penyedia barang/jasa 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Pelaporan penolakan dan penerimaan dan Gratifikasi ke UPG/KPK dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 3. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas 2. Bimtek pengadaan barang/jasa 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya			
		Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	Prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak transparan dan akuntabel	Sedang	1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Komitmen dan Keteladanan 2. Perhatian khusus atas hal tertentu 3. Menghindari situasi benturan kepentingan 4. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistem	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			
8	Staf/Pe gawai	Gratifikasi	Mendapatka n fasilitas/ha diah/bingki san	Tinggi	Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas 2. Implementasi UPG 3. Penyusunan peta risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi/ sosial isasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Pembuatam media public kampanye anti gratifikasi 3. Monev kode etik dan perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari situasi benturan kepentingan 2. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penggunaan aset	3. Penggunaan aset instansi untuk kepentingan pribadi dan keluarga 4. Penggunaan aset jabatan/instansi di luar kedinasan	Tinggi	1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada	1. SOP Penatausahaan aset 2. SK Penetapan pengguna asset BMN 3. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan pada saat penyerahan barang dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima barang	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. SK Penanggungjawab penggunaan Aset 3. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 4. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Menghindari situasi benturan kepentingan 2. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendekatan Individu	Strategi Penanganan/Pendekatan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rahasia Instansi	Membocorkan rahasia instansi untuk kepentingan pribadi/golongan atau pemangku kepentingan	Tinggi	1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penandatanganan pakta integritas dilakukan setiap tahun pada awal tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan 2. Implementasi Whistle Blowing System	1. Internalisasi/Sosialisasi tentang Pembangunan Integritas atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku 2. Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Tindak lanjut hasil Monev Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1. Menghindari situasi benturan kepentingan 2. Pemantauan dan evaluasi

No	Subjek	Bentuk/Situasi Potensi Benturan Kepentingan	Jenis Benturan Kepentingan	Tingkat Risiko	Sumber Penyebab	Strategi Penanganan/Pendek atan Individu	Strategi Penanganan/Pendeka tan Sistim	Upaya Keberhasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan jabatan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

